



Dewan dan Pejabat Beli Mobil Rp 24 M

MANGUPURA - Kerap dikritik tak membuat Pemkab Badung teliti dalam melakukan belanja keuangan. Tahun 2016 mendatang, dengan menggunakan uang APBD, Pemkab Badung tetap melakukan belanja jor-joran dengan membeli puluhan mobil dinas (mobdin) baru ■

► Baca **Dewan...** Hal 35

Mobdin Baru Di Badung

- | | |
|--|--|
| ► Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Rp 230 juta | ► Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Rp 460 juta |
| ► Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Rp 460 juta | ► Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes (BPMD) Rp 230 juta |
| ► Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Rp 230 juta | ► Kantor Arsip Rp 230 juta |
| ► Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Rp 8,84 miliar lebih | ► Dinas Pariwisata Rp 600 juta |
| ► Sekretariat Dewan Rp 13,09 miliar lebih | |

Total dana yang akan digunakan sebesar Rp 24,37 miliar.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Setwan Badung Mendapat 37 Unit

■ DEWAN...

Sambungan dari hal 27

Data yang didapat koran ini, dana untuk belanja mobdin baru ini sebesar Rp 24,3 miliar. Mobil ini akan digunakan untuk kalangan pejabat dan wakil rakyat anggota DPRD Badung.

Padahal, mobdin yang ada saat ini masih mulus. Bahkan bisa dikatakan untuk operasional sangat laik. Nyaris tidak ada kerusakan sama sekali. Informasi yang dihimpun koran ini, mobdin baru ini disebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti Disdikpora, BPMD dan DKP Badung (selengkapnya lihat grafis). Tapi yang paling banyak mendapat jatah adalah sekretariat dewan (Setwan). Untuk Setwan Badung mendapat 37 unit mobdin jenis kijang Inova. Kemungkinan mobdin baru ini

akan "dipersembahkan" untuk anggota dewan.

Untuk diketahui, saat ini seluruh anggota dewan telah mendapatkan jatah mobil dinas jenis kijang Inova. Sedangkan pimpinan dewan (ketua, wakil ketua) mendapatkan jatah mobil Toyota Fortuner dan sedan Toyota Camry. Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Badung I Made Wira Darmajaya yang tak membantah adanya rencana belanja mobdin baru. Namun detailnya Wira mengaku tidak tahu. Dijelaskan, pengadaan mobil di SKPD yang dipimpinnya sejumlah 37 unit, untuk operasional sekretariat dewan. Namun dia tidak memungkiri mobil-mobil jenis Toyota Inova tersebut akan digunakan oleh anggota dewan. "Pengadaan mobil untuk operasional sekretariat dewan, yang kemudian digunakan oleh anggota dewan," terangya. (san/yes)

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 27 dan 35



TATA PRAJA

Inspektorat Bali Cek SKPD di Buleleng

SINGARAJA - Inspektorat Bali secara mendadak melakukan pengecekan keuangan di delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Buleleng. Baik Inspektorat Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng, sama-sama menyatakan sidak itu hanya rutinitas belaka, dan tidak ada masalah berarti.

Meski menyebut hanya rutinitas biasa, namun Inspektorat Bali diterima dalam pertemuan yang tertutup bagi awak media, di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Rombongan itu dipimpin Kepala Inspektorat Bali Ketut Teneng dan diterima Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka. Dalam rapat itu juga ada beberapa kepala SKPD yang hadir.

Delapan SKPD yang disebut menjadi sasaran auditor di Inspektorat Bali adalah Dinas Kesehatan Buleleng, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Buleleng, Badan Polisi Pamong Praja dan Linmas Buleleng, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Buleleng, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng, Dinas Sosial Buleleng, Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Buleleng, serta Dinas Pekerjaan Umum Buleleng.

Sekcab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang ditemui usai pertemuan tertutup, menyebutkan kedatangan auditor dari inspektorat adalah hal yang biasa dan tak perlu dianggap sebagai sesuatu yang heboh. Puspaka menyebutkan Inspektorat hanya melakukan audit rutin sekaligus melakukan pembinaan kepada pemkab. "Wajar saja. Pengawas dalam pemerintahan ini kan banyak. Ada BPK, ada inspektorat juga. Inspektorat turun kesini juga wajar, karena kita ini kan dibawah Pemprov, kata Puspaka. Sementara itu Kepala Inspektorat Bali Ketut Teneng juga mengatakan hal serupa. Katanya, audit yang dilakukan Pemprov adalah hal yang wajar. Audit itu pun belum dilakukan secara menyeluruh, dan hanya mengambil sampel di delapan SKPD saja. (eps/djo)

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 33